

## **Perilaku Politik Masyarakat Pulau Rajuni Kecamatan Takabonerate pada Pemilukada Selayar 2020**

**Oleh:**

**<sup>1</sup> Madpirah Maulani; <sup>2</sup> Ariana Yunus; <sup>3</sup> Sakinah Nadir**

<sup>1,2,3</sup>. Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email. [hello.madfirah@gmail.com](mailto:hello.madfirah@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi perilaku politik dan partisipasi politik masyarakat Desa Rajuni di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah 2020. Menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik dan tingkat partisipasi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga Desa Rajuni, tokoh masyarakat, pejabat desa, dan perwakilan lembaga non-pemerintah. Analisis data meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat Pulau Rajuni dipengaruhi oleh money politik, kesadaran politik, dan mobilisasi oleh tokoh lokal. Suku Bugis lebih cenderung dipengaruhi oleh money politik dengan pendekatan Rational Choice. Kesadaran politik juga penting, di mana pemilih mempertimbangkan visi, misi, dan program calon yang relevan dengan kebutuhan mereka. Mobilisasi oleh tokoh lokal yang berpengaruh secara ekonomi turut mempengaruhi pilihan politik. Tingkat partisipasi politik masyarakat Pulau Rajuni cukup tinggi, mencapai 70% pada Pemilihan Gubernur 2018 dan Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perilaku politik dan partisipasi masyarakat di daerah kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang signifikan.

**Kata kunci : Perilaku; Partisipasi Politik; Masyarakat Kepulauan; Pilkada**

---

### **Abstract**

*This research explores the political behavior and political participation of the Rajuni Village community in Takabonerate Sub-district, Selayar Islands Regency, South Sulawesi, in the context of the 2020 Regional Head Election. Using a qualitative approach and a case study design, this research explores the factors that influence political choices and the level of community participation in 3T (Disadvantaged, Frontier and Outermost) areas. Data were collected through in-depth interviews with Rajuni villagers, community leaders, village officials, and representatives of non-governmental organizations. Data analysis included three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the political choices of the Rajuni Island community were influenced by money politics, political awareness, and mobilization by local figures. The Bugis tribe is more likely to be influenced by money politics with a Rational Choice approach. Political awareness is also important, where voters consider the vision, mission and programs of candidates that are relevant to their needs. Mobilization by economically influential local figures also influences political choices. The level of political participation of the Rajuni Island community is quite high, reaching 70% in the 2018 Governor Election and the 2020 Selayar Islands Regency Regent Election. This research provides insights into political behavior and community participation in an archipelago with significant geographic and social challenges.*

**Keywords: Behavior; Political Participation; Islanders; Pilkada**

---

**PENDAHULUAN**

Perilaku politik mengacu pada interaksi aktor-aktor politik dalam masyarakat, pemerintah, dan institusi dalam proses politik. Paling tidak, ada pihak yang memerintah, pihak yang menentang, dan pihak lain yang patuh dan berdampak pada proses politik, termasuk pembuatan kebijakan, implementasi, dan penegakan hukum. Perilaku politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan pilihan-pilihan politik (Surbakti 1992). Perilaku manusia dalam kehidupan politik ini sebagai perilaku yang tidak terpisah dari kelompok, golongan atau partai. Dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara partisipasi politik dibutuhkan sebagai wujud keikutsertaan dalam proses politik. Perilaku Politik dan Partisipasi Politik merupakan suatu kesatuan (Pusida, Agustinus Pati, dan Trintje Lambey 2018). Perilaku Politik merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, dalam pemilihan umum, masyarakat mengambil kekuasaan penuh untuk memilih wakil yang ia percaya untuk duduk di bangku parlemen atau mengambil bagian dalam struktur pemerintahan (Sutarna, Subandi, dan Zitri 2023).

Partisipasi Politik adalah aspek penting dalam negara demokrasi yang juga menjadi tanda modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik (Hasimu dan Amsir 2020). Partisipasi politik berfokus pada kegiatan politik pribadi individu dalam proses politik, seperti memberikan suara atau kegiatan politik lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam rangka berpartisipasi dalam pemerintahan. Partisipasi ini bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi juga mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan harapan mereka akan perubahan positif melalui pemilihan kepala daerah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan perilaku masyarakat dalam pemilihan. Tentu berbeda pola perilaku dan kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan begitu juga dengan kondisi masyarakat di pulau dan dataran utama. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perilaku politik masyarakat kepulauan khususnya partisipasinya dalam politik dengan memberikan hak suaranya pada suatu pemilihan umum.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dua kabupaten yang geografi wilayahnya berbentuk kepulauan yakni salah satunya Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada pada bagian paling selatan Pulau Sulawesi. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki satu kecamatan yang didalamnya terdapat 15 buah pulau. Kecamatan ini bernama Kecamatan Takabonerate. Dimana memiliki desa bernama Desa Rajuni. Desa Rajuni secara administratif berada pada kecamatan Takabonerate. Desa Rajuni terbagi atas dua pulau yaitu pulau Rajuni Bakka dan Rajuni Kiddi dengan pusat administrative di Pulau Rajuni Kiddi (Rajuni). Pulau dengan luas daratan 3,6 km<sup>2</sup> yang di bagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Utara dengan 158 Kepala Keluarga yang didiami Suku Bajo dan Dusun Selatan yang didiami suku bugis sebanyak 156 Kepala Keluarga dengan total wajib pilih sebanyak 1.200 orang dengan presentasi 52,1% masyarakat suku Bajo dan 45,7% masyarakat suku Bugis dan sisanya merupakan pendatang (Selayar 2020).

Pulau Rajuni jika merujuk pada 21 kriteria yang ditetapkan oleh Bappenas termasuk faktor ekonomi, pendidikan, sosial, infrastruktur dan lain sebagainya, menjadi salah satu pulau dengan kategori wilayah 3T. Layaknya daerah 3T pada umumnya, pulau Rajuni tidak memiliki sumber tenaga listrik, dalam kesehariannya masyarakat pulau Rajuni mengandalkan genset sebagai sumber listrik yang digunakan pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai pukul 21.00 atau lebih, tergantung keperluan masing – masing rumah hingga awal bulan Januari 2016 dengan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membangun panel surya untuk 11 pulau terluar, terdepan dan tertinggal di Indonesia termasuk pulau Rajuni (Chandra 2015). Untuk sumber air tawar, karena berasal dari pendangkalan laut (atol) masyarakat pulau Rajuni mengandalkan penampungan air hujan sebagai air tawar yang di gunakan memasak dan untuk sektor komunikasi, beberapa rumah di pulau Rajuni memiliki antena buatan yang hanya bisa mendapat cukup sinyal hanya untuk satu telepon saja.

Masyarakat pulau Rajuni sebagai masyarakat pulau pada umumnya menggantungkan hidupnya dari aktifitas bahari dengan jenis usaha sebagai nelayan, pengusaha pelayaran dan pedagang hasil hasil laut, dan sebagian kecil masyarakat pulau Rajuni berprofesi sebagai PNS dan TNI. Pulau Rajuni dapat ditempuh dengan menggunakan kapal selama 9 atau 10 jam jika cuaca cerah dengan jadwal yang tidak tetap dari Pelabuhan Benteng, Selayar. Perilaku politik masyarakat pulau Rajuni menarik untuk di teliti karena perilaku pemilih di daerah dengan kategori tertinggal, terdepan, dan terluar dengan daerah daratan tentu jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Benteng, Ibukota Kabupaten Selayar atau daerah lain yang berada di pulau utama Kabupaten Kepulauan Selayar karena dipengaruhi oleh minimnya pendidikan dan informasi, distribusi sarana dan prasana politik yang kurang memadai dan tidak seimbang, akses yang menyulitkan sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak cukup transparan.

Masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar kurang mendapatkan pendidikan politik, sehingga mereka acuh tak acuh terhadap pemerintah. Selain itu, beberapa anggota masyarakat percaya bahwa politik tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka, sehingga banyak orang lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah daripada meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pemilu (Andyanto et al. 2023). Akan tetapi tidak semua masyarakat tertinggal, terdepan, dan terluar tidak paham akan politik khususnya dalam keikutsertaannya terhadap pemilihan umum contohnya masyarakat Pulau Rajuni. Keterbatasan yang dirasakan oleh masyarakat tidak membatasi masyarakat Pulau Rajuni berpartisipasi dalam pemilihan. Tercatat dalam dua kontestasi pemilihan terakhir menunjukkan angka partisipasi yang cukup tinggi. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 angka partisipasi mencapai 75,7% (Avatar 2018). Hampir sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Selayar tahun 2020 angka partisipasi masyarakat Pulau Rajuni menggunakan hak pilihnya berada diangka 75,7% (Humas 2021).

Partisipasi politik masyarakat kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 menunjukkan

dinamika yang menarik dan signifikan. Masyarakat kepulauan, yang secara geografis tersebar dan terpisah oleh laut, menghadapi tantangan logistik dan akses informasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat di daratan utama. Namun, hal ini tidak menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Tingginya angka partisipasi pemilih di daerah ini mencerminkan kesadaran politik yang semakin meningkat dan keinginan kuat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka (Ola Riantoby 2021). Masyarakat kepulauan di Selayar turut serta dalam pemilihan dengan antusiasme, memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia, seperti posko-posko pemilihan yang dibangun di desa-desa kepulauan, serta kampanye yang dilakukan melalui media lokal dan sosial. Para calon bupati dan wakil bupati juga menyadari pentingnya suara dari masyarakat kepulauan ini, sehingga mereka secara aktif mengunjungi pulau-pulau, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan berjanji untuk mengatasi isu-isu spesifik yang dihadapi oleh penduduk kepulauan, seperti infrastruktur, transportasi, dan akses layanan kesehatan.

Penduduk Pulau Rajuni yang memiliki hak pilih tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintahan Indonesia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran yang tinggi akan meyakini bahwa memilih wakil rakyat sangat penting bagi kesejahteraan, masa depan bangsa dan negara, serta terwujudnya masyarakat yang cerdas. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pemilu. Misalnya, mencari tahu siapa calon yang baik untuk menjadi wakil rakyat yang akan dipilih dengan tidak hanya melihat janji-janji atau ditawarkan uang sogokan yang sedikit, sehingga memilih calon yang akan merugikan masyarakat Desa Rajuni. Dari uraian tersebut penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku politik masyarakat di Pulau Rajuni sebagai masyarakat yang tinggal di daerah kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) khususnya pada saat pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Selayar tahun 2020, faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat pulau Rajuni dalam menjatuhkan pilihannya, dan bagaimana tingkat partisipasinya pada pemilukada Kabupaten Selayar.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam perilaku politik masyarakat di Desa Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kepulauan, serta mengungkap makna yang mendasari tindakan politik mereka (Ahyar et al. 2020). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian terletak pada satu unit analisis yang spesifik, yaitu Desa Rajuni. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai perilaku politik dan partisipasi politik masyarakat di desa tersebut dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Desa Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Desa Rajuni terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Rajuni Bakka dan Rajuni Kiddi, dengan pusat administratif di Pulau Rajuni Kiddi. Lokasi ini dipilih karena termasuk dalam kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan

memiliki karakteristik sosial dan politik yang unik. Dengan subjek penelitian yakni, Masyarakat Desa Rajuni yang memiliki hak pilih, Tokoh masyarakat dan tokoh adat, Pejabat pemerintahan desa, dan Perwakilan dari lembaga non-pemerintah yang aktif di Desa Rajuni.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Rajuni, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan desa, dan perwakilan lembaga non-pemerintah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai partisipasi politik dan perilaku politik di Desa Rajuni. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yakni Reduksi Data yakni menyaring dan merangkum data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian Display Data untuk menyajikan data dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi yang memudahkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antar data serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi sebagai bagian dari menginterpretasikan data yang telah disusun untuk menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan cross-check antar sumber data (Sugiyono 2010). Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perilaku politik dan partisipasi politik masyarakat di Desa Rajuni, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Politik Masyarakat Pulau Rajuni pada Pilkada Selayar 2020**

Demokrasi merupakan proses politik yang didalamnya terdapat partisipasi. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Liando 2016). Partisipasi politik dapat didefinisikan secara luas sebagai upaya individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi warga negara dalam proses politik tidak hanya berarti warga negara mendukung keputusan atau kebijakan pemimpinnya, partisipasi politik masyarakat idealnya didasari oleh kesadaran politik masyarakat, karena hal tersebut akan berdampak pada kehidupan mereka. Pada tanggal 9 Desember 2020, diadakan pemilihan kepala daerah serentak di beberapa kabupaten di Sulawesi selatan, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Selayar tahun 2020, masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Takabonerate adalah 8.769 orang, 1.034 orang diantaranya berada di pulau Rajuni (Wandi 2020).

**Tabel 1. Penggunaan Hak Suara Pemilih Pulau Rajuni**

No	Pemberian Hak Suara	Jumlah
1	Pemilih terdaftar	1034
2	Menggunakan hak suara	749
3	Suara sah	747
4	Suara tidak sah	2
5	Tidak menggunakan hak suara	290

Sumber : Catatan Kepala Desa Rajuni.

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi masyarakat Pulau Rajuni terbilang cukup tinggi dengan jumlah 749 orang, meskipun terdapat 279 orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Banyak pihak mengakui bahwa masyarakat Pulau Rajuni cukup aktif dalam menggunakan hak pilih mereka. Tingkat ketidakhadiran di TPS pada Pemilu tahun 2020 mencapai 27%, namun hal ini tidak sepenuhnya berarti 27% masyarakat apatis. Ada banyak alasan yang menyebabkan orang tidak menggunakan hak pilihnya, seperti pekerjaan nelayan yang masih melaut atau beberapa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Secara umum, masyarakat Pulau Rajuni sangat sadar akan pentingnya peduli dan berpartisipasi aktif dalam setiap pemilihan. Sebelumnya, partisipasi masyarakat di Pulau Rajuni juga cukup tinggi. Hal ini terbukti saat pemilihan kepala desa di mana mereka turut menyiapkan dan berpartisipasi. Mereka sadar bahwa partisipasi mereka dapat membawa kehidupan yang lebih baik. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik dengan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Budiardjo 2008).

Secara teoritis partisipasi politik yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo sudah terlihat pada situasi masyarakat di pulau Rajuni. hal tersebut telah terbukti pada saat kesadaran mereka memberikan hak suaranya dan juga mencari informasi pada saat momentum pilkada tiba. Partisipasi politik merupakan kunci perubahan bagi masyarakat-masyarakat yang menetap dalam daerah-daerah dengan kategori 3T, dengan turut aktif memberikan suaranya pada pemilihan masyarakat juga turut membangun wilayahnya dan keluar dari kondisi kemiskinan yang merupakan faktor utama di daerah kategori 3T.

Tingginya partisipasi politik merupakan hasil dari pilihan politik masyarakat yang ia jatuhkan pada seseorang yang ia anggap pantas. Pilihan adalah salah satu komponen dari perilaku secara umum. Perilaku, baik secara umum maupun dalam domain yang lebih spesifik seperti perilaku politik, adalah produk dari proses interaksi sosial yang cukup kompleks (Hastira 2020). Tingginya partisipasi politik di Pulau Rajuni pada pemilu Kabupaten Selayar tidak terlepas dari sosialisasi dengan hasil informasi, ide, visi-misi serta program yang ditawarkan para calon kepala daerah yang nantinya akan mempengaruhi pilihan Politik masyarakat pulau Rajuni. Perilaku memilih mereka adalah produk sosial, terdiri dari banyak elemen sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain dan menghasilkan berbagai respons terhadap objek politik. Informasi menjadi sangat penting dalam prosedur ini, setiap informasi akan dikontrol untuk mengakomodasi informasi

selanjutnya. Perbedaan akses informasi dan sosialisasi dalam suatu komunitas menyebabkan setiap aksi atau reaksi memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola konsekuensi dari informasi yang berkaitan dengan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selayar.

Berdasarkan sejumlah informan yang diwawancarai, terdapat tujuh dari sepuluh informan yang mengaku melibatkan diri atau ikut memilih pada pemilukada 2020. Marcel, salah seorang informan adalah petugas Jagawana di Taman Nasional Takabonerate, dalam wawancara yang dilakukan di kantor Jagawana Pulau Tinabo menunjukkan partisipasi yang tinggi pada Pemilukada Kabupaten Selayar. Marcel mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pemilukada informasi tersebut yang didapatkan dengan mudah karena ia bekerja dibidang pariwisata Takabonerate yang memudahkannya ke Benteng untuk mendapatkan informasi seputar pemilukada. Dalam hal pilihan politikpun Marcel mengaku telah memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan pilihannya berdasarkan keinginannya sendiri yang merupakan kesimpulan dari hasil informasi yang ia himpun. Lingkungan kerja Marcel yang memudahkan ia mendapatkan informasi mengenai Pemilukada tentu juga memudahkannya untuk menarik kesimpulan akan pilihan politiknya. Keputusan Marcel tidak didasarkan pada apa yang dia sukai atau apa yang memengaruhi keputusannya sebagai individu atau aktor; sebaliknya, sangat penting bahwa kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan konsisten dengan tindakan yang disukai aktor (Ritzer dan J.Goodman 2007).

Pilihan politik adalah produk dari proses sosialisasi, yang mencakup akses terhadap informasi tentang gagasan dan perspektif misi dan rencana para kandidat, sehingga pengetahuan yang terkumpul menjadi dasar untuk mengevaluasi objek-objek politik (Iriyani Astuti Arief, Muhammad Ishak Syahadat, dan M. Najib Husain 2024). Informasi ini dapat diterima individu melalui media, keluarga, lingkungan sosial, atau kampanye yang dilakukan oleh calon atau tim suksesnya. Pola partisipasi yang didasarkan pada kecukupan informasi yang diterima dan akses mudah terhadap informasi tersebut memunculkan reaksi yang beragam terhadap objek politik. Selain melibatkan kognisi, aspek afektif dan evaluatif juga berperan dalam tindakan yang muncul sebagai reaksi. Lingkungan tempat tinggal seseorang mempengaruhi pilihan politiknya dan menyediakan ruang untuk mengolah informasi serta memunculkan reaksi terhadap stimulus politik. Seperti yang dikemukakan oleh Greinstein, "perilaku atau bentuk peristiwa mental apa pun tergantung pada keadaan orang tersebut dan pada saat yang sama pada lingkungan." Perilaku atau segala bentuk mental tergantung pada keberadaan orang tersebut dalam hal ini lingkungan (Greenstein 1992).

Masyarakat dalam melihat calon – calon yang akan menjadi pemimpin menentukan pilihannya karena latar belakang wilayah yang termasuk dalam salah satu dari kategori 3T. Kurangnya sosialisasi dari tim – tim pemenangan calon bersangkutan bukan menjadi alasan bagi masyarakat untuk bersikap apatis atau masa bodoh. Mereka sadar akan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat yang dimana dengan keterbatasan tempat tinggal mereka dan kurangnya pendidikan politik tidak menjamin bahwa mereka akan langsung tergiur dengan janji politik yang di bawah oleh para calon. Dengan pemahaman sadar akan kebutuhan

sesungguhnya menjadi sebuah modal bagi masyarakat Pulau Rajuni tetap memegang teguh prinsipnya.

Berbeda dengan pendapat beberapa informan sebelumnya, Hasni warga kampung bugis alumni salah satu Universitas di Kota Makassar dalam wawancaranya mengungkap ketidakikutsertaannya pada saat pemungutan suara sebagai bentuk kekecewaan atas sikap pemerintah daerah yang menurutnya acuh terhadap pembangunan yang tergolong lambat dan tidak merata di Kecamatan Takabonerate khususnya Desa Rajuni. Ketidakikutsertaan seseorang dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar lalu diakuinya bukan sebagai bentuk apatis dan tidak peduli melainkan adalah bentuk kepedulian terhadap realitas meskipun tidak ikut memilih. Hal ini merupakan reaksi yang dilakukan oleh penduduk yang semestinya di perhatikan oleh pemerintah karena jika penduduk secara sadar menjadikan alasan tersebut untuk tidak memilih, maka akan menjadi sebuah ancaman bagi sistem demokrasi negara ini.

Bentuk kekecewaan masyarakat atas kurangnya perhatian dari pemerintah setempat atas ketidakmerataan pembangunan di daerah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar terbukti dengan terbentuknya Forum Percepatan Pemekaran Kaupaten Kepulauan Taakabonerate (TP2KKT) yang terdiri dari lima kecamatan seperti Kecamatan Takabonerate, Kec. Pasimasunggu, Kec. Pasilambena, Kec. Pasimarannu dan Kec. Pasimasunggu Timur. Lingkungan memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Hal ini sesuai dengan sudut pandang sosiologis, yang menempatkan kegiatan pemungutan suara dalam kerangka sosial yang lebih besar. Secara konkret, faktor demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota vs desa), pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan, dan agama mempengaruhi seseorang untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

### **Faktor yang mempegaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Selayar 2020**

#### ***Pilihan Politik based On Money Orientity***

Money politik dan pemilihan umum tidak bisa di pisahkan, sampai hari ini ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan uang dengan imbalan mendapatkan dukungan pada saat hari pencoblosan. Bagi masyarakat pulau Rajuni, money Politik bukanlah hal baru dan harus ditutupi. Hal ini tidak lain merupakan efek dari tempat tinggal dan lingkungan mereka. Akses yang terbatas, keterbatasan informasi, dan lambatnya kemajuan dalam sarana dan prasarana umum menyebabkan masyarakat Pulau Rajuni, yang termasuk dalam kategori 3T, menghadapi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Beberapa masalah tersebut antara lain: 1) Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan ekonomi yang datang setiap saat. 2) Keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang berdampak pada kemampuan usaha. 3) Lemahnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada. 4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. 5) Degradasi sumber daya lingkungan, baik di wilayah pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil. 6) Belum kuatnya kebijakan negara terkait program penguatan kemaritiman Indonesia sebagai pilar pembangunan nasional. (Kusnadi 2017).

Masyarakat di pulau-pulau yang tidak memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan harus menghadapi kenyataan terpinggirkannya mereka secara perlahan-lahan secara sosio-ekonomi, meskipun potensi di lokasi mereka cukup menjanjikan untuk memperbaiki kondisi. Salah satu solusinya adalah meningkatkan kesadaran melalui pendidikan. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kekuatan politik, budaya, sosial, dan ekonomi (Kusnadi 2017). Sehingga fakta kemiskinan dan sekelumit masalah bisa segera diselesaikan secara perlahan.

Money politik di Pulau Rajuni sendiri muncul di tengah tengah masyarakat. Akses yang jauh sehingga memerlukan waktu, biaya dan tenaga extra, keterbatasan alat komunikasi dimanfaatkan oleh salah satu calon dengan memberi uang sebagai bentuk “kerja sama” yang diharapkan mampu meraup simpati sehingga adanya keberpihakan masyarakat pada satu calon pada saat pemilihan berlangsung. Kondisi ini banyak di temukan di Kampung Bugis. Suku Bugis di Pulau Rajuni, selain sebagai nelayan, juga dikenal sebagai suku yang gemar berdagang. Mereka merasa bahwa gerakan politik para pemimpin mereka selalu berkaitan dengan kalkulasi uang, sehingga perjuangan untuk kepentingan masyarakat tidak terasa. Dalam kondisi seperti ini, sikap apriori masyarakat terhadap partai politik, tokoh politik, asas partai, dan janji-janji politik sangat tinggi. Secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi pemilih di Desa Rajuni yang kurang peduli terhadap asal partai, platform partai, program kerja, latar belakang organisasi massa, atau latar belakang pribadi calon. Yang penting bagi mereka adalah siapa yang memberikan uang, dia yang akan dipilih. Hal ini disebabkan karena pada masa kampanye, tidak ada calon yang datang untuk memperkenalkan diri, memaparkan program kerja, atau menyampaikan visi dan misinya. Dalam salah satu pendekatan perilaku politik yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala daerah, yaitu pendekatan pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman. Dalam teori pilihan rasionalnya, Coleman menyebutkan bahwa ada dua unsur yang terlibat, yaitu aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik (Adcock 2019). Dalam Pemilukada sendiri yang dinamakan actor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah.

Kondisi masyarakat yang berada di wilayah tergolong 3T ini menjadikan peluang bagi kardidat calon untuk melakukan money politik. Perolehan suara yang diperoleh bukan berdasarkan program yang ditawarkan. Dapat dikatakan, masyarakat yang menerima “serangan fajar” dapat bertindak rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, dalam perilaku pilihan rasional, pemilih bertindak secara rasional, dengan memilih kandidat atau partai politik yang dianggap memberikan keuntungan paling banyak dengan kerugian yang paling sedikit. Pemilih seharusnya mampu menilai isu-isu politik yang ditawarkan. Penilaian yang masuk akal terhadap isu-isu politik dan kandidat dapat berupa posisi, informasi, atau individu yang terkenal dengan keberhasilannya dalam bidang-bidang seperti seni, olahraga, perfilman, organisasi politik, dan sebagainya (Markowski, Żerkowska-Balas, dan Stanley 2024). Dari pernyataan beberapa informan diatas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi apakah masyarakat ingin berpartisipasi atau tidak, lebih lanjut lagi menemukan bahwa faktor lingkungan sosial seperti halnya keluarga dan teranga juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh.

Masyarakat di Pulau Rajuni menentukan pilihan berdasarkan apa yang diberikan oleh kardidat calon. Mereka sadar dan beranggapan apa yang diberikan kardidat merupakan sesuatu yang pertama dan terakhir yang akan mereka rasakan sebagai bantuan dari pemerintah. Karena mereka tahu betul bahwa kardidat yang terpilih pasti tidak akan lagi melirik apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pulau Rajuni dan melupakan semua janji politik yang di sodorkan ke masyarakat. Selama ini meraka sudah terbiasa dengan kondisi wilayah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah sebab tidak ada kepedulian langsung dari pihak pemerintah.

### ***Pilihan Politik Based On Political Needed***

Daerah 3T atau daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan merupakan daerah yang butuh pengawasan khusus pada saat Pemilihan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pendidikan politik ataupun sosialisasi pra pemilu pada masyarakat karena terbatasnya akses telekomunikasi dan transportasi. Dengan keterbatasan yang ada, masyarakat di lingkungan 3T memandang segala sesuatunya dengan cara yang terbilang tradisional. Lingkungan ataupun territorial seseorang menentukan pola pikir dalam bertindak yang secara tidak langsung juga mempengaruhi sikap dan pilihan mereka pada saat pemilihan baik itu skala kecil seperti pemilihan kepala lingkungan hingga skala nasional seperti pemilihan Presiden. Dalam hal ini, kesadaran politik kunci merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat di daerah 3T, dengan turut aktif dalam proses politiknya masyarakat 3T dapat menyuarkan aspirasi dan menuntut hak mereka demi kesejahteraan mereka nantinya seperti yang telah dilandaskan dalam Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 merupakan rangkaian proses demokrasi yang akan menampilkan berbagai macam acara, masing-masing dengan penyambutan yang unik. Tentunya ada berbagai macam informasi yang harus disediakan, baik oleh penyelenggara pemilu terkait tata cara memilih yang baik dan benar maupun oleh peserta pemilu itu sendiri, khususnya terkait apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk kontribusi positif jika terpilih.

Akses informasi mengenai proses ini diperlukan agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Tentu saja, keterlibatan semua lapisan sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pilkada di daerah 3T. Kebanyakan informan dalam penelitian ini mengaku memperoleh pengetahuan tentang pilihan politik dari lingkungan keluarga dan pergaulan mereka. Kebanyakan informasi tentang calon datangnya dari hasil diskusi, pilihan politik mereka sendiri atau bincang-bincang antar warga desa (gossip), hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses informasi media baik itu cetak maupun media elektronik serta jarak tempuh yang terbilang sulit di jangkau.

Sebagaimana dijelaskan dalam perspektif teori pertukaran, metode ini menekankan pada harapan atau orientasi individu dengan perilaku individu. Seseorang akan melakukan aktivitas tertentu karena menginginkan sesuatu sebagai bentuk pertukaran sosial. Hal ini kemudian melahirkan perilaku politik dari berbagai proses sosialisasi, termasuk mengharapkan perubahan, visi misi yang baik, hingga nilai-nilai pragmatis yang ada di dalamnya. Pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil dari evaluasi terhadap

kandidat tersebut. Evaluasi ini sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa digunakan oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, terutama bagi pejabat yang hendak mencalonkan kembali, antara lain kualitas, kompetensi, dan integritas kandidat (Efriza 2012). Beberapa menganggap bahwa informasi pemilukada itu penting dan merupakan kebutuhan, akan berupaya mengakses perkembangan pemilukada, sedangkan bagi informan yang minim informasi menganggap informasi politik tidak akan berpengaruh dan mendatangkan perubahan bagi kehidupan sehari-harinya.

Kompleksitas, ketaatan, keraguan, dan ketidakpastian adalah sifat-sifat yang harus dipertimbangkan oleh para pemilih ketika membuat keputusan. Selain itu, keraguan publik dipengaruhi oleh ketidakmampuan para kontestan untuk menempatkan diri mereka dalam topik politik, yang menghasilkan pesan politik yang mengambang dan sulit dipahami. Selain itu, informasi yang tersedia sering kali bertentangan dengan kenyataan.

Pengambilan keputusan didasarkan pada apakah pengambil keputusan itu logis atau tidak logis. Weber membedakan antara rasionalitas nilai dan rasionalitas tujuan (Firmanzah 2012). Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi tindakan berdasarkan suatu nilai, apakah itu etika, moralitas, agama, estetika, kesukaan, atau asal-usul. Rasionalitas seorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang ia pegang, bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitas tujuan, di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan tindakan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaian, dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan tindakannya mendukung tujuan akhir. Semakin efektif seseorang atau kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih pemilih. Para pemilih cenderung tidak memilih kontestan yang kurang mampu menawarkan program kerja dan hanya mengandalkan jargon-jargon politik. Memilih dengan menggunakan hati nurani atau murni berdasarkan pilihannya merupakan salah satu bentuk partisipasi politik aktif karena mencerminkan kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.

#### ***Pilihan Politik Based On Politic Mobilitation***

Partai politik dan kelompok kepentingan, menurut Grillo (2023), adalah agen mobilisasi politik (Grillo 2023). Partisipasi yang dimobilisasi didefinisikan sebagai partisipasi yang memprioritaskan dukungan masyarakat terhadap proyek atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial, yang menyiratkan bahwa manipulasi dan tekanan dari pihak lain terkait erat dengan keterlibatan individu atau kelompok. Efek ini lazim terjadi selama musim pemilihan umum. Huntington dan Nelson mengidentifikasi dua jenis partisipasi pemilih: otonom dan dimobilisasi. Faktanya, di negara berkembang, perilaku memilih tidak hanya dipengaruhi oleh pemilih (partisipasi otonom), tetapi juga oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu (partisipasi yang dimobilisasi) (Weisstanner dan Jensen 2024). Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan dan kesejahteraan relatif masih rendah sementara beberapa budaya masih berlangsung dengan kuat di masyarakat.

Dalam konteks Pulau Rajuni misalnya proses mobilisasi politik biasanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan dilakukan oleh *local strongman*. Bapak Aleo salah satu warga di kampung Bajo mengungkapkan bahwa pemilik kapal memiliki kekuatan untuk menentukan pilihan politik para pekerjanya. Dikatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok lain akan dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan yang sama dengan pihak yang pertama. Dalam konteks ini *local strongman* memiliki peran yang besar dalam menghimpun suara ketika pemilihan sedang berlangsung (Fraenkel 2019). Seorang juragan ikan atau pemilik kapal yang memiliki sumber daya keuangan yang signifikan menggunakan wilayah Desa Bajo sebagai basis suara dalam pilkada. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membentuk tim pemenangan di tingkat ranting. Banyak orang direkrut sebagai kelompok, terutama nelayan kecil yang menjual ikan kepada juragan ikan atau buruh nelayan. Cara ini tentu saja merupakan tradisi pengumpulan suara yang sukses, tetapi tidak memberikan pendidikan politik yang memadai. Namun, keputusan seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh orang kuat setempat; dalam hal ini, ada orang yang memilih karena mereka mendukungnya.

Perilaku ikut-ikutan seperti itu berasal dari kegagalan mereka dalam mengidentifikasi sifat-sifat pemimpin yang ideal menurut mereka. Selain itu, perilaku ikut-ikutan seperti itu berasal dari kurangnya mental pemilih untuk memandu keputusan mereka. Meskipun demikian, perilaku ini menunjukkan bahwa dia lebih memilih pilihan yang sama dengan pasangannya. Dalam situasi ini, perilaku memilih dipengaruhi oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari organisasi atau pemimpin tertentu (Rahimkhani 2024). Perilaku ini juga merupakan contoh partisipasi politik yang dimobilisasi. Kehadiran orang-orang yang tidak terbiasa terlibat dan memberikan suara terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe Apatitis. Tipe ini menunjukkan perilaku apatis di kalangan pemilih, terutama pemilih pemula, yang dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa tidak penting bagi mereka untuk terlibat dalam pemilu; akibatnya, mereka kurang tertarik pada pemilu, seperti bergabung dengan tim sukses atau bergabung dengan partai politik. Selain itu, mereka juga kurang mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik terkini.

## KESIMPULAN

Pilihan Politik Masyarakat pulau Rajuni pada Pemilu 2020 Kepulauan Selayar tahun 2020 berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal masyarakat pulau Rajuni sebagai lingkungan yang masuk dalam kategorie 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal), keterbatasnya akses informasi, komunikasi dan transportasi yang tersedia membuat masyarakat Pulau Rajuni menjatuhkan pilihan politiknya sesuai dengan visi misi calon yang berkorelasi dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat Pulau dan sesuai dengan kepentingannya. beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat Pulau Rajuni yakni, pertama Faktor Money Politik banyak di temukan di Kampung Bugis yang merupakan suku yang senang berdagang dan menentukan segala hal dalam perspektif untung – rugi dengan menggunakan pendekatan Rational Choice yaitu memilih kandidat atau partai politik yang

dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya. Kedua, faktor kesadaran politik merupakan salah satu bentuk usaha dalam perbaikan taraf hidup masyarakat pulau rajuni menjadi hal - hal yang prioritas dan menjadi pertimbangan. Masyarakat memilih calon sesuai dengan visi misi dan program yang diharapkan dapat membangun Pulau Rajuni menjadi lebih baik sesuai dengan pendekatan psikologis yang mendorong pemilih menentukan pilihannya pada orientasi kandidat, isu, dan tema. Ketiga, Faktor Mobilisasi yang terjadi di pulau Rajuni dipengaruhi oleh local strongman atau seseorang yang memiliki kekuatan tertentu dalam menghimpun massa dengan menggunakan pendekatan ekonomi seperti pemilik kapal.

**DAFTAR PUSTAKA:**

- Adcock, Gale. 2019. "A Place for Money in Politics." *The Journal for Nurse Practitioners* 15(2):210–11. doi: 10.1016/j.nurpra.2018.11.016.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M. Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, M. Si. Helmina Andriani, Rhousandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Andyanto, Hidayat, Samiruddin, Rahman Tandi, dan Muhammad Ishak Syahadat. 2023. "Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Kepala Daerah." *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi* 1(1):29–37. doi: 10.24929/fh.v4i2.1415.
- Avatar. 2018. "Angka Partisipasi Pemilih Selayar 80%, Kecamatan Bontomanai Tertinggi." *Selayarnews.com*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chandra, Wahyu. 2015. "Potret Pulau Rajuni, Dari Pengeboman Ikan hingga Kurangnya Air Bersih." *mongabay*. Diambil (<https://www.mongabay.co.id/2015/09/14/potret-pulau-rajuni-dari-pengeboman-ikan-hingga-kurangnya-air-bersih/>).
- Efriza. 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. 3 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fraenkel, Jon. 2019. "Ethnic Politics and Strongman Loyalties in Fiji's 2018 Election." *The Journal of Pacific History* 54(4):480–506. doi: 10.1080/00223344.2019.1599152.
- Greenstein, Fred I. 1992. "Can Personality and Politics Be Studied Systematically?" *Political Psychology* 13(1):105. doi: 10.2307/3791427.
- Grillo, Alberto. 2023. "Political alienation and voter mobilization in elections." *Journal of Public Economic Theory* 25(3):515–31. doi: 10.1111/jpet.12628.
- Hasimu, Hasimu, dan Achmad Abdi Amsir. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar." *Vox Populi* 2(2):88. doi: 10.24252/vp.v2i2.11975.
- Hastira, Muh. Fichriyadi. 2020. "Perubahan Politik Elektoral Dan Strategi Menghadapinya (Studi Kasus Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif 2019) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)." Universitas Hasanuddin.
- Humas, KPU. 2021. *Tingkat Partisipasi Pemilihan 2020 Capai 76,09 Persen*. Selayar.
- Iriyani Astuti Arief, Muhammad Ishak Syahadat, dan M. Najib Husain. 2024. "DINAMIKA PERILAKU POLITIK MASYARAKAT MENJELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 DI KECAMATAN LAWAN KABUPATEN MUNA BARAT." *Journal Publicuho* 6(4):1602–10. doi:

- 10.35817/publicuho.v6i4.322.
- Kusnadi. 2017. *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*. diedit oleh A. Q. Shaleh. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Liando, Daud M. 2016. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3(2):14–28.
- Markowski, Radosław, Marta Żerkowska-Balas, dan Ben Stanley. 2024. "Participation in Polish Local Elections: Sheer Rational Choice or Social Embeddedness Fate?" *East European Politics and Societies: and Cultures* 38(1):123–47. doi: 10.1177/08883254231177416.
- Ola Riantoby, Alwan. 2021. "PILKADA 2020 & COVID 19: PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH DALAM PENDEKATAN BUDAYA POLITIK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3(1):85–121. doi: 10.55108/jbk.v3i1.250.
- Pusida, Rianto, Agustinus Pati, dan Trintje Lambey. 2018. "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Eksekutif* 1(1):1–11.
- Rahimkhani, Kourosh. 2024. "Political opposition and voter mobilization in an authoritarian state: The case of parliamentary elections in Iran." *British Journal of Middle Eastern Studies* 51(3):636–53. doi: 10.1080/13530194.2022.2141687.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. 6 ed. Jakarta: Kencana.
- Selayar, Badan Pusat Statistika Kabupaten Kepulauan. 2020. *Kecamatan Takabonerate dalam Angka 2020*. Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutarna, Iwan Tanjung, Azwar Subandi Subandi, dan Ilham Zitri. 2023. "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu." *TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT* 3(1):38. doi: 10.31764/transformasi.v3i1.14723.
- Wandi. 2020. "Pilkada 2020, KPUD Selayar Tetapkan 93.797 DPT." *Mediata.id*. Diambil (<https://mediata.id/2020/10/pilkada-2020-kpud-selayar-tetapkan-93-797-dpt/>).
- Weisstanner, David, dan Carsten Jensen. 2024. "Political mobilisation and socioeconomic inequality in policy congruence." *European Journal of Political Research*. doi: 10.1111/1475-6765.12661.